

EUFEMISME DALAM BAHASA POLITIK INDONESIA: KAJIAN KONSEPTUAL

Isnandi Abdul Rozak Riaji¹

email : isnandiar1908@gmail.com

Universitas Bale Bandung, Jawa Barat Indonesia

Ahmad Zaelani²

email : naruse1908@gmail.com

Universitas Bale Bandung, Jawa Barat Indonesia

Rifdi Fahrizal Taharas³

email : naruse1908@gmail.com

Universitas Bale Bandung, Jawa Barat Indonesia

ABSTRACT

This study discusses euphemisms in Indonesian political language as a linguistic strategy and instrument of power. Using a qualitative method based on literature review, the analysis was conducted using Allan & Burridge's theoretical framework, Fairclough's critical discourse analysis, and Orwell's reflections on political language. Data were obtained from political texts, mass media, official documents, and relevant academic literature. The results show that euphemisms are used to obscure reality and reduce public resistance. Terms such as "fuel price adjustment," "organizational downsizing," or "measured decisive action" demonstrate how language is used to frame perceptions and legitimize policies. From Allan & Burridge's perspective, euphemisms can be divided into political correctness and concealment. Fairclough's analysis confirms that this kind of language is reproduced by the media to form a discourse hegemony, while Orwell's reflections show the danger when lies are made to sound honest and oppression seems reasonable. In conclusion, political euphemisms in Indonesia are not only a linguistic phenomenon but also a socio-political practice that has implications for transparency, accountability, and the quality of democracy. Therefore, critical awareness is needed to read the hidden meanings behind political terms and to present a more honest counter-discourse.

Keywords: euphemism, political language, critical discourse, power, democracy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eufemisme dalam bahasa politik Indonesia sebagai strategi linguistik sekaligus instrumen kekuasaan. Dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, analisis dilakukan melalui kerangka teori Allan &

Burridge, analisis wacana kritis Fairclough, serta refleksi Orwell tentang bahasa politik. Data diperoleh dari teks politik, media massa, dokumen resmi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eufemisme dipakai untuk menyamarkan realitas dan mereduksi resistensi publik. Istilah seperti “*penyesuaian harga BBM*”, “*perampingan organisasi*”, atau “*tindakan tegas terukur*” memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk membingkai persepsi sekaligus melegitimasi kebijakan. Dalam perspektif Allan & Burridge, eufemisme dapat dibedakan menjadi *political correctness* dan *concealment*. Analisis Fairclough menegaskan bahwa bahasa semacam ini direproduksi oleh media hingga membentuk hegemoni wacana, sedangkan refleksi Orwell menunjukkan bahaya ketika kebohongan dibuat terdengar jujur dan penindasan tampak wajar. Kesimpulannya, eufemisme politik di Indonesia bukan hanya fenomena linguistik, tetapi juga praktik sosial-politik yang berimplikasi pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis untuk membaca makna tersembunyi di balik istilah politik serta menghadirkan wacana tandingan yang lebih jujur.

Kata kunci: eufemisme, bahasa politik, wacana kritis, kekuasaan, demokrasi

Submitted: 19-09-2025 | Accepted: 28-02-2026 | Published: 28-02-2026

1. Pendahuluan

Bahasa selalu menjadi medium utama dalam politik (Wilujeng, 2013). Dalam setiap pidato pejabat, debat publik, hingga regulasi, kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan (Wati Kurniawati, 2022). Misalnya, pengalaman masyarakat ketika mendengar istilah “*penyesuaian harga BBM*” terasa lebih ringan dibanding “*kenaikan harga BBM*”. Begitu pula dengan kata “*perampingan organisasi*” yang terdengar lebih manusiawi ketimbang “*pemecatan massal*”. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa politik kerap dipilih dan dirancang dengan hati-hati agar menciptakan persepsi tertentu di tengah masyarakat.

Di Indonesia, praktik eufemisme politik berkembang dalam berbagai wacana: pidato kenegaraan, pernyataan resmi pemerintah, bahkan dalam berita media (Azaky, 2024). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Orwell (1946) bahwa bahasa politik sering digunakan untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan tindakan keras tampak dapat diterima (Kurniawan, 2021). Fenomena serupa terlihat dalam praktik pemerintahan, di mana kebijakan yang berpotensi menimbulkan resistensi publik dibalut dengan istilah yang lebih halus, misalnya “*relokasi*” alih-alih “*penggusuran*”. Fenomena ini menjadi bagian dari strategi komunikasi politik untuk menjaga legitimasi dan mereduksi konflik sosial.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah eufemisme semata-mata mencerminkan kesantunan berbahasa, ataukah ia merupakan bentuk

kontrol ideologi yang menyamarkan realitas sosial-politik? Hubungan antara pengalaman masyarakat mendengar bahasa politik dan praktik penggunaan istilah halus menunjukkan bahwa eufemisme bukan sekadar strategi linguistik, melainkan juga memiliki dimensi politik. Dengan demikian, bahasa politik Indonesia dapat dibaca sebagai arena pertarungan makna yang memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan negara (Fajrulan Khaer, 2025).

Tabel 1. Beberapa Penggunaan Eufemisme dalam Konteks Gaya Komunikasi Pemerintahan Indonesia

Istilah Eufemisme Politik	Makna Sebenarnya	Konteks Penggunaan	Sumber
<i>Penyesuaian harga BBM</i>	Kenaikan harga BBM	Kebijakan energi dan ekonomi	Kompas (2022)
<i>Perampangan organisasi</i>	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	Reformasi birokrasi, BUMN	Tempo (2021)
<i>Relokasi pemukiman</i>	Penggusuran paksa	Proyek pembangunan infrastruktur	BBC Indonesia (2020)
<i>Pengamanan aset negara</i>	Penyitaan tanah masyarakat	Sengketa lahan dan investasi	Katadata (2019)
<i>Pengalihan subsidi</i>	Penghapusan subsidi	Kebijakan fiskal	Detik (2014)

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa eufemisme dalam politik bukan fenomena acak, melainkan konsisten digunakan dalam isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik (Ibrohimi, 2024). Hal ini menegaskan pandangan Fairclough (1995) bahwa bahasa merupakan sarana dominasi dan hegemoni dalam praktik sosial (Ibnu Ajan Hasibuan, 2020).

Kajian ini menjadi relevan karena di tengah meningkatnya keterbukaan informasi, masyarakat tetap berhadapan dengan bahasa politik yang tidak sepenuhnya transparan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini menguraikan eufemisme sebagai bagian dari komunikasi politik Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori eufemisme Allan & Burridge (Muhammad Daud Zaid, 2018), teori wacana kritis Fairclough (Silaswati, 2019), dan refleksi Orwell mengenai bahasa politik (Beda Holy Septianno, 2025). Sementara secara praktis, fenomena ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Dari penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran kritis bahwa eufemisme dalam bahasa politik tidak hanya sekadar pilihan diksi yang santun, tetapi juga instrumen yang dapat membentuk realitas sosial-politik. Dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada dalam memahami wacana politik, sehingga tidak sekadar menerima makna di permukaan. Artikel ini diharapkan berkontribusi pada literatur linguistik-politik di Indonesia serta memberi pencerahan bahwa bahasa adalah alat kekuasaan yang bisa dipakai untuk membangun legitimasi maupun menyembunyikan kebenaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap bahasa politik: dari sekadar medium komunikasi menjadi sarana pengendalian makna dalam ruang demokrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis konsep dan makna bahasa, bukan pada data numerik. Dalam hal ini, deskriptif dimaknai sebagai upaya menghadirkan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan eufemisme dalam bahasa politik Indonesia melalui pengolahan data berupa kata-kata, teks, maupun wacana (Wekke, 2019). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman secara holistik terhadap fenomena linguistik dan politik, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menganalisis data (Yusanto, 2019)..

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti menelaah berbagai sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, media massa, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema eufemisme politik (Muannif Ridwan, 2021). Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "*eufemisme politik*", "*bahasa politik Indonesia*", "*komunikasi politik*", dan "*wacana kekuasaan*". Pemilihan sumber didasarkan pada validitas akademik dan kredibilitas penerbitan, baik dari jurnal ilmiah maupun publikasi populer yang dapat dipertanggungjawabkan (Paskalia Yasinta, 2020)..

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian (Rifda El Fiah, 2017), Kedua, penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan analisis konseptual untuk memperjelas pola eufemisme yang muncul (M Askari Zakariah, 2020) Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu tahap pengolahan hasil analisis menjadi temuan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap kajian bahasa politik di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana eufemisme berfungsi tidak hanya sebagai strategi linguistik, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam praktik politik Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

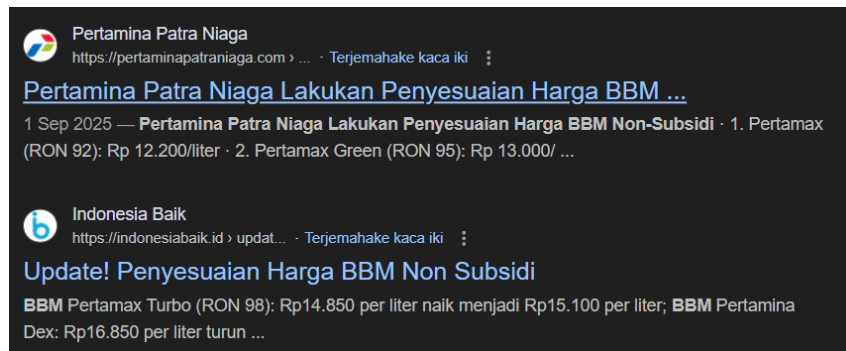
Pembahasan

Eufemisme sebagai Strategi Bahasa Politik

Bahasa politik Indonesia pada dasarnya menunjukkan realitas bahwa pemilihan kata sejatinya tidak pernah netral (Fatimah Cindy Ambarsari Cindy, 2024). Bahasa Indonesia selalu memiliki tujuan tertentu, terutama dalam membentuk citra, menyamarkan realitas, dan mengarahkan persepsi publik dengan subjektivitas yang berbeda dalam tatanan komunikasi (Bungin, 2018). Dalam bahasa Allan & Burrige (1991) hal ini sering berkaitan dengan eufemisme atau lebih tegasnya eufemisme hadir untuk menghaluskan atau mengganti kata yang kasar, tabu, atau menimbulkan resistensi.

Dalam praktik politik, hal ini menjadi semakin penting karena bahasa tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, melainkan juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan (M. Fahri Harahap, 2025). Contoh yang paling mudah dikenali adalah istilah “*penyesuaian harga BBM*” yang dipilih oleh pemerintah ketika menaikkan harga bahan bakar. Alih-alih menggunakan kata “*kenaikan*” yang berpotensi memicu kemarahan, istilah “*penyesuaian*” memberi kesan wajar dan teknokratis.

Gambar 1. Tampilan Hasil Screenshot Penggunaan Eufemisme dalam konteks berita di Indonesia



Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Dalam bahasan Fairclough (1995) bahasa sebagai dipandang sebagai praktik sosial yang sarat ideologi (Lukmana, 2010). Dengan kacamata analisis wacana kritis, eufemisme politik di Indonesia dapat dibaca sebagai upaya mereproduksi kekuasaan melalui wacana. Kata-kata yang dipilih politisi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membingkai bagaimana realitas dipahami oleh masyarakat. Misalnya, istilah “*perampingan organisasi*” digunakan dalam reformasi birokrasi atau restrukturisasi BUMN untuk menggantikan

“PHK massal”. Kata “perampingan” membawa asosiasi positif, yakni lebih ramping, sehat, dan efisien, padahal substansinya tetap menyangkut hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Dengan demikian, eufemisme menciptakan jarak antara kata dan realitas sosial.

Kemudian, dalam bahasan (Orwell, 2014) dalam esai terkenalnya *Politics and the English Language* menyatakan bahwa bahasa politik sering digunakan untuk membuat kebohongan terdengar jujur, pembunuhan tampak terhormat, dan tindakan represif terasa wajar. Refleksi ini menemukan relevansinya dalam politik Indonesia. Misalnya, istilah “relokasi pemukiman” yang digunakan untuk menggantikan “penggusuran paksa”. Kata “relokasi” menghadirkan kesan bantuan dan solusi, tetapi di baliknya sering kali terdapat konflik, pemaksaan, dan kehilangan hak masyarakat kecil. Eufemisme seperti ini menunjukkan bagaimana kata-kata dapat menjadi tameng yang menutupi kenyataan keras.

Fenomena eufemisme dalam politik Indonesia dapat dipetakan melalui beberapa kasus aktual yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Tabel berikut menunjukkan beberapa istilah eufemisme politik, makna sebenarnya, serta dampaknya terhadap persepsi publik:

Tabel 2 Istilah Eufemisme yang digunakan dalam politik Indonesia

Istilah Eufemisme Politik	Makna Sebenarnya	Konteks Penggunaan	Dampak pada Persepsi Publik
<i>Tindakan tegas terukur (2022)</i>	Penembakan/ pembunuhan oleh aparat	Penanganan konflik keamanan	Membingkai tindakan represif seolah profesional dan legal
<i>Ketidaknyamanan publik (2019)</i>	Kerusuhan/ demonstrasi besar-besaran	Aksi protes mahasiswa dan buruh	Mereduksi skala konflik menjadi sekadar gangguan
<i>Perlindungan tenaga kerja asing (2018)</i>	Prioritas terhadap pekerja asing	Investasi & proyek infrastruktur	Menghaluskan resistensi masyarakat terhadap TKA
<i>Kebocoran anggaran (2021)</i>	Korupsi/ penyelewengan dana	Kasus korupsi proyek pemerintah	Mengurangi kesan kriminal, seolah hanya masalah teknis

<i>Stabilisasi harga pangan (2020)</i>	Kenaikan harga bahan pokok	Kebijakan pasar & impor	Memberikan kesan pengendalian, padahal masyarakat terbebani
--	----------------------------	-------------------------	---

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Data baru ini menunjukkan bahwa eufemisme digunakan di berbagai sektor, mulai dari keamanan (*tindakan tegas terukur*), (*ketidaknyamanan publik*), hingga ekonomi (*stabilisasi harga pangan*). Semua istilah tersebut berfungsi menyamarkan realitas agar tampak lebih terkendali.

Berdasarkan kerangka Allan & Burrige (1991), eufemisme politik Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, politik massa *political correctness*, yaitu penggunaan istilah netral untuk menghindari kata yang berkonotasi negatif. Misalnya, "*perampangan organisasi*" menggantikan "*PHK*". Kedua, *concealment*, yaitu upaya menutupi fakta dengan kata-kata yang lebih halus, seperti "*pengamanan aset negara*" untuk menyembunyikan realitas penyitaan tanah masyarakat. Dua kategori ini memperlihatkan bahwa eufemisme tidak sekadar sopan santun, melainkan juga alat strategis untuk membentuk realitas politik sesuai kepentingan kekuasaan.

Sedangkan Fairclough (1995) menjelaskan tiga dimensi analisis wacana: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Dalam politik Indonesia, dimensi teks tampak dalam pemilihan kata yang halus. Dimensi praktik wacana terlihat ketika media massa mereproduksi istilah eufemistis tanpa kritik. Misalnya, banyak media besar menggunakan istilah "*penyesuaian harga*" persis sebagaimana dinyatakan pemerintah, sehingga memperkuat bingkai wacana yang dibangun sebagaimana tangkapan layar di atas. Sementara pada dimensi praktik sosial, eufemisme memperkokoh hegemoni politik karena masyarakat dipaksa memahami kebijakan melalui lensa kata-kata yang telah dimanipulasi.

Normalisasi Eufemisme dan Bahaya bagi Demokrasi

Bahaya dari penggunaan eufemisme secara berlebihan adalah terciptanya normalisasi bahasa politik yang menipu. Orwell (1946) mengingatkan bahwa bahasa buruk melahirkan politik buruk. Jika publik terbiasa dengan istilah eufemistis, maka kritik terhadap kebijakan akan semakin lemah karena masyarakat tidak lagi melihat realitas yang sesungguhnya. Misalnya, ketika "*pengalihan subsidi*" diterima sebagai sesuatu yang wajar, publik melupakan bahwa makna sebenarnya adalah penghapusan subsidi yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok.

Walau sering dikritik, eufemisme politik tidak selalu bersifat negatif. Dalam fungsi pragmatik, eufemisme dapat membantu menjaga komunikasi yang kondusif dan menghindari konflik terbuka. Misalnya, penggunaan kata

“perbaikan sistem” alih-alih “kegagalan kebijakan” dapat membuat diskusi lebih konstruktif. Namun, masalah muncul ketika fungsi ini berubah menjadi alat manipulasi ideologis. Di titik inilah, eufemisme menjadi masalah etis dalam praktik politik karena mengorbankan transparansi demi citra.

Munculnya kesadaran kritis masyarakat terhadap eufemisme politik merupakan tanda bahwa praktik ini tidak sepenuhnya efektif. Media alternatif, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil mulai membongkar makna di balik kata-kata yang digunakan politisi. Analisis linguistik kritis dapat menjadi alat untuk membongkar praktik manipulasi tersebut, sehingga publik tidak terjebak pada permukaan kata, tetapi mampu membaca realitas yang tersembunyi. Dengan cara ini, eufemisme justru dapat memicu perlawanan wacana yang menyetatkan demokrasi.

Sintesis Teoretis dan Praktis dalam Konteks Indonesia

Untuk memahami fenomena eufemisme dalam politik Indonesia secara menyeluruh, kita perlu mensintesis teori Allan & Burrige, Fairclough, serta refleksi Orwell ke dalam praktik nyata. Tabel berikut menyajikan hubungan antara teori, praktik di Indonesia, serta implikasinya bagi demokrasi:

Tabel 3 Sintesis Teoretis dan Praktis dalam Konteks Indonesia

Teori/Refleksi	Pokok Gagasan	Contoh Praktik di Indonesia	Implikasi bagi Demokrasi
Allan & Burrige (1991)	Eufemisme digunakan untuk menghaluskan bahasa dan menyamarkan realitas	Istilah “perampangan organisasi” untuk PHK, “stabilisasi harga pangan” untuk kenaikan harga	Menunjukkan strategi komunikasi elit politik dalam mengurangi resistensi sosial
Fairclough (1995)	Bahasa adalah praktik sosial yang mereproduksi ideologi dan kekuasaan	Media mainstream menggunakan istilah pemerintah tanpa kritik, misalnya “penyesuaian harga”	Reproduksi wacana hegemonik yang membuat masyarakat menerima kebijakan tanpa banyak perlawanan
Orwell (1946)	Bahasa politik membuat kebohongan terdengar jujur	“Relokasi pemukiman” menggantikan penggusuran paksa; “tindakan	Risiko normalisasi politik represif dan hilangnya transparansi dalam demokrasi

	dan penindasan tampak wajar	<i>tegas terukur</i> " untuk penembakan	
--	-----------------------------	--	--

Tabel sintesis ini menunjukkan bahwa eufemisme bukanlah sekadar fenomena linguistik, melainkan juga fenomena sosial-politik yang berbahaya jika tidak dikritisi. Bahasa politik yang penuh eufemisme dapat mengikis akuntabilitas pemerintah dan memperlemah partisipasi kritis masyarakat.

4. Kesimpulan

Eufemisme dalam bahasa politik Indonesia memperlihatkan bahwa pilihan kata tidak pernah netral, melainkan sarat kepentingan ideologis dan strategis. Berdasarkan teori Allan & Burridge, eufemisme digunakan sebagai sarana untuk menghaluskan realitas atau menyembunyikan fakta yang berpotensi menimbulkan resistensi publik. Praktiknya tampak dalam istilah seperti "*penyesuaian harga BBM*", "*perampangan organisasi*", atau "*tindakan tegas terukur*" yang berfungsi menggantikan kata-kata yang lebih keras dan berisiko memicu penolakan masyarakat.

Dengan kerangka Fairclough, eufemisme dapat dibaca sebagai praktik wacana yang membingkai realitas sosial sekaligus mereproduksi ideologi kekuasaan. Pemilihan kata oleh elit politik yang kemudian direproduksi oleh media massa tanpa kritik menciptakan kondisi hegemonik, di mana masyarakat dipaksa memahami kebijakan dalam bingkai bahasa yang sudah dimanipulasi. Dalam perspektif Orwell, praktik ini berbahaya karena menjadikan kebohongan terdengar jujur dan penindasan tampak wajar, sebagaimana tercermin dalam istilah "*relokasi pemukiman*" yang menutupi realitas penggusuran paksa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eufemisme politik di Indonesia bukan hanya fenomena linguistik, tetapi juga instrumen kekuasaan yang memiliki implikasi serius terhadap demokrasi. Bahasa yang dibungkus eufemisme dapat menormalkan tindakan represif, melemahkan transparansi, dan mengikis akuntabilitas. Namun demikian, tidak semua eufemisme bersifat negatif; dalam konteks pragmatik, ia dapat berfungsi menjaga komunikasi yang lebih kondusif. Persoalan muncul ketika fungsi tersebut berubah menjadi alat manipulasi ideologis.

Oleh karena itu, penting adanya kesadaran kritis publik untuk tidak hanya berhenti pada permukaan kata, melainkan mampu membaca makna tersembunyi di balik istilah-istilah politik. Analisis wacana kritis, media independen, dan peran akademisi menjadi kunci dalam membongkar manipulasi bahasa tersebut. Dengan cara ini, eufemisme justru dapat menjadi pemicu lahirnya wacana tandingan yang sehat, sehingga praktik politik di Indonesia tidak kehilangan transparansi dan tetap berpijak pada prinsip demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa politik, melalui eufemisme, adalah arena pertarungan makna yang menentukan bagaimana publik memahami kebijakan dan kekuasaan. Kesadaran kritis terhadap penggunaan eufemisme bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga vital bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azaky, A. O. (2024). Eufemisme dalam Pidato Soekarno Pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. *Jurnal Basataka (JBT)*, 688-698 .
- Beda Holy Septianno, A. A. (2025). Bahasa Sebagai Teknologi Bio-Politik: Analisis Novel 1984 dalam Perspektif Teori Foucault dan Agamben. *Dekonstruksi*, 13-21.
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Jakarta: Prenada Media.
- Fajrulan Khaer, A. A. (2025). Analyze the Language Used in Political News and Its Implications for Public Opinion: Analisis Bahasa yang Digunakan Dalam Berita Politik, Serta Implikasinya Terhadap Opini Publik. *Jurnal Riseta Soshum* , 1-6.
- Fatimah Cindy Ambarsari Cindy, A. F. (2024). Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik : Variasi Gaya Bahasa Calon Presiden Dalam Debat Pertama Pilpres 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5702-5720.
- Ibnu Ajan Hasibuan, A. I. (2020). Hegemoni bahasa milenialisasi pada slogan demonstrasi: Analisis wacana kritis. *Jurnal Konfiks*, 9-16.
- Ibrohimi, A. (2024). Eufemisme Komunikasi Politik: Studi Komparasi Debat Pilpres 2019-2024 Dan 2024-2029. *Dakwatul Haq: Journal of Da'wah and Islamic Communication* , 42-51.
- Kurniawan, W. (2021). *Jorge Luis Borges, Realisme Magis, dan Filsafat*. Yogyakarta: BASABASI.
- Lukmana, I. (2010). Analisis bahasa untuk kajian sosial: pemaknaan kritis terhadap praktek berwacana sebagai praktek sosial. *Diss. Udayana University*.
- M Askari Zakariah, V. A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Reseach, Reseach and Development (RnD)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- M. Fahri Harahap, M. M. (2025). Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik: Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3495-3503.
- Muannif Ridwan, S. A. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 42-51.

- Muhammad Daud Zaid, M. S. (2018). Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban. *International Journal of Language Education and Applied Linguistics*.
- Orwell, G. (2014). *Politics and the English language*. Penguin UK.
- Paskalia Yasinta, E. M. (2020). Studi Literatur: Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa melalui pendekatan contextual teaching and learning (CTL). *Asimtot: Jurnal Kependidikan Matematika* , 129-138.
- Rifda El Fiah, A. P. (2017). Penerapan Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 3.2, 171-184.
- Silaswati, D. (2019). Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana. *METAMORFOSIS | Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 1-10.
- Wati Kurniawati, R. E. (2022). Kekuasaan Semantik Dalam Analisis Wacana Kritis Debat Capres-Cawapres. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 165-179.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.
- Wilujeng, S. R. (2013). Bahasa Politik dalam Perspektif Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein. *HUMANIKA* , 16(9).
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1).